



Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Jakarta, Januari 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja Tahun 2020. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sejak 2016 atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai unit kerja yang baru berdiri tahun 2020 secara langsung menerapkan sistem tersebut secara penuh. Dengan metode tersebut kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 telah ditetapkan 12 Sasaran Strategis yang diukur dengan 13 IKU. SS dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Pada tahun 2020 ini Rancangan Kebijakan ataupun Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk penyerapan anggaran per 31 Desember 2020 telah terealisasi sebesar Rp. 6.629.607.336,- atau sebesar 95,08 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.594.017.000,-. Serapan ini disebabkan beberapa faktor yaitu penetapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru pada bulan

Agustus 2020, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa agenda yang telah direncanakan harus ditunda dan jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan masih belum optimal.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 dihitung berdasarkan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diinput ke dalam aplikasi SIK-M. Capaian SS dan IKU juga dipengaruhi oleh kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Semoga laporan kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan selama tahun 2020. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

Deputi Bidang Koordinasi
Investasi Dan Pertambangan,






Sepuan Hario Seto

Agustus 2020, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa agenda yang telah direncanakan harus ditunda dan jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan masih belum optimal.

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 dihitung berdasarkan Manual IKU yang telah ditetapkan dan diinput ke dalam aplikasi SIK-M. Capaian SS dan IKU juga dipengaruhi oleh kinerja unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Semoga laporan kinerja Tahun 2020 Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan selama tahun 2020. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

No	Pejabat	Paraf
1	Sekretaris Deputi	
2	Kabag Program	
3	Kasubbag Pemantauan & Evaluasi	

Deputi Bidang Koordinasi
Investasi Dan Pertambangan,



Septian Hario Seto

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	3
C Aspek Strategis	7
D Isu Strategis	8
E Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A Rencana Strategis	10
1 Visi	10
2 Misi	11
3 Tujuan	11
4 Sasaran Strategis	11
B Target Kinerja	14
C Perjanjian Kinerja Tahun 2020	18
D <i>Cascading</i> Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	21
E Pengukuran Kinerja Tahun 2020	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A Capaian Kinerja Sasaran Strategis	28
B Analisis Capaian Kinerja	31
C Capaian Indikator Kinerja Utama	34
D Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	41
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2020	45
Lampiran II Capaian Indikator Kinerja Utama TA 2020	50
Lampiran III Data Kegiatan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Tahun 2020	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 4
Gambar 2.1	Jenis Keluaran Menurut Kegiatan 14
Gambar 2.2	Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak 15
Gambar 2.3	Alur Keluaran Kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 16
Gambar 2.4	Simulasi <i>Cascading</i> IKU Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 21
Gambar 3.1	Rangking <i>Ease Of Doing Business</i> 34
Gambar 3.2	<i>Starting a Business</i> 35

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 13
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 17
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 20
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Untuk Periode Triwulan III Tahun 2020 29
Tabel 3.2	Realisasi Investasi Januari-September 2020 34
Tabel 3.3	Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan 35
Tabel 3.4	Total Investasi Sektor Tersier..... 36
Tabel 3.5	Persentase Realisasi Investasi Proyek Strategis Nasional 36
Tabel 3.6	Realiasi Kontribusi Industri Logam Dasar Terhadap PDB 37
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020..... 38
Tabel 3.8	Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 38
Tabel 3.9	Pagu dan Realiasi Anggaran Unit Eselon II Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan 40

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyusun laporan kinerja triwulan IV Tahun 2020. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 memuat 12 Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Terakhir, sebagai bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 4 (empat) IKU yakni (1) persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan, (2) Nilai PMPRB Deputy, (3) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy dan (4) nilai IKPA Deputy.

Pengukuran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada saat berakhirnya Tahun 2020 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU datanya dapat diperoleh dan telah dilaksanakan pengukuran, mulai dari *stakeholder* hingga *learning and growth perspective*.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai capaian pada *Stakeholder Perspective* sebesar 97,23 persen, *Customer Perspective* sebesar 96,66 persen, *Internal Business Perspective* sebesar 100 persen dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 110,83 persen. Capaian rata-rata

kinerja organisasi atau unit mencapai 101,18 persen. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 12 sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 13 indikator kinerja utama. Dari 13 indikator kinerja utama sebanyak 8 indikator tercapai melebihi target dan 5 indikator belum tercapai. Indikator yang belum tercapai sebanyak 2 indikator pada *stakeholder perspective* dan 3 indikator pada *customer perspective*. Sedangkan untuk *internal business perspective* dan *learning and growth perspective* seluruhnya tercapai.

Untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai SS dan IKU serta pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi pada tahun 2020, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memperoleh alokasi anggaran pada DIPA awal yang terbit pada bulan Agustus 2020 berjumlah Rp. 10.000.000.000,-, dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran terutama untuk perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana unit kerja baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan penghematan dan pemotongan anggaran sejumlah Rp. 4.005.982.363,-. Penghematan dan pemotongan anggaran tersebut dialihkan ke Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Pada bulan November 2020, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- yang berasal dari Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, sehingga total anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yaitu Rp. 6.594.017.000,-. Realisasi Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar Rp. 6.243.620.576,- atau sebesar 94,69 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 6.594.017.000.

Realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah. Kedua, kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan *stakeholder* di daerah yang terkena dampak pandemi. Ketiga, jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.

Analisa terhadap capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020, belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja dan realisasi kegiatan maupun anggarannya dengan capaian tahun sebelumnya, dan juga keseluruhan Sasaran

Strategis merupakan hal yang baru dan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai penyelesaian komponen kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang semuanya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2020.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada Investasi Indonesia, antara lain :

1. Dinamika politik dan perdagangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan;
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja;
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 92 tahun 2019 dan Permenko Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjawab tantangan permasalahan investasi di Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada tiga sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam upaya mendorong pencapaian kemudahan berinvestasi dan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan yang berkelanjutan. *Pertama*, terwujudnya iklim investasi yang

kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. *Kedua*, meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. *Ketiga*, meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selanjutnya difokuskan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Terdapat tujuh kegiatan utama pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. *Pertama*, koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. *Kedua*, koordinasi investasi bidang jasa. *Ketiga*, koordinasi investasi strategis. *Keempat*, koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. *Kelima*, koordinasi pertambangan. *Keenam*, penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Asisten Deputy tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputy. Mempedomani Renstra Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024, layanan kesekretariatan tersebut berfokus kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang cepat, akurat dan komprehensif; serta kinerja yang akuntabel.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputy. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program dan *output* kegiatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang penanaman modal serta pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputy berikut indikator kinerjanya. Untuk tahun 2020 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, fungsional dan staf.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkannya perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process, learning and growth, dan customer perspective*. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang merupakan unit kerja baru terbentuk pada tahun 2020 dan langsung mengadopsi sistem ini pada seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

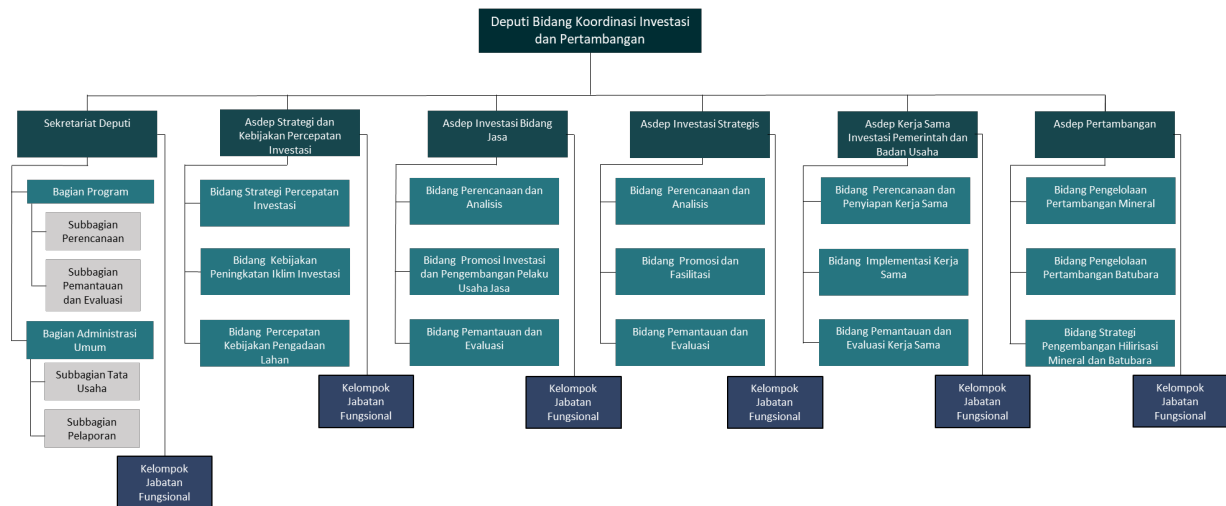
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi, dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Deputi;
- b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi;
- c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa;

- d. Asisten Deputy Investasi Strategis;
- e. Asisten Deputy Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
- f. Asisten Deputy Pertambangan.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Investasi dan pertambangan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. pemantauan, analisis, dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan;
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa,

- promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa.

Asisten Deputi Investasi Strategis

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan

badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

Asisten Deputi Pertambangan

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

C. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai aspek strategis untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas investasi serta nilai tambah sektor pertambangan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha dan pertambangan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang investasi dan pertambangan diarahkan untuk mempercepat:

1. Perbaiki iklim investasi dan kualitas investasi;

2. Memperbaiki defisit transaksi berjalan;
3. Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia;
4. Penanaman modal dalam negeri dan *Foreign Direct Investment* (FDI);
5. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia;
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata;
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

D. Isu Strategis

Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berperan dalam mewujudkan tercapainya ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian strategi dan kebijakan percepatan investasi;
2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi bidang jasa;
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi strategis;
4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha;
5. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pertambangan.

Kelima program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2020 sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan;
2. Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
3. Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa;
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa;
5. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa;
6. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Sektor Jasa;

7. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis;
8. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis;
9. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Strategis;
10. Koordinasi Kebijakan Pengembangan perencanaan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha;
11. Koordinasi Kebijakan implementasi peninjauan minat pasar kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha;
12. Koordinasi Kebijakan monitoring dan evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha;
13. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral;
14. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu bara;
15. Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada triwulan IV tahun 2020. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) pada triwulan IV tahun 2020 dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode triwulan IV tahun 2020 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk periode triwulan IV tahun 2020. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan pada laporan kinerja tahunan selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi merupakan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi mengandung kondisi ideal dan harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Untuk terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Sehingga sebagai unit kerja yang mendukung tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diformulasikan visi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang selaras dengan Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu:

Investasi Berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk Mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”

Visi Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing merupakan implementasi Visi Presiden RI dan Visi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Visi ini dapat dimaknai sebagai bentuk mendukung terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

2. Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berkontribusi pada misi Presiden dan Wakil Presiden diantaranya misi ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; dan misi ke-3 yaitu Pembangunan yang merata dan berkeadilan; dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing;
2. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Kedua misi ini akan dijalankan selaras dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional khususnya terkait bidang Investasi dan Pertambangan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian tahun 2020 - 2024, RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam” sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020 – 2024. Dengan mempertimbangkan

sasaran tersebut, Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 serta tujuan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka dirumuskan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024 adalah:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia;
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata;
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi;
2. Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
3. Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional;
4. Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional;
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan.

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut:

1. Efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan;
2. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
3. Terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputy bidang investasi & pertambangan yang baik;
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.	Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. 2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata.
	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.	Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.	3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

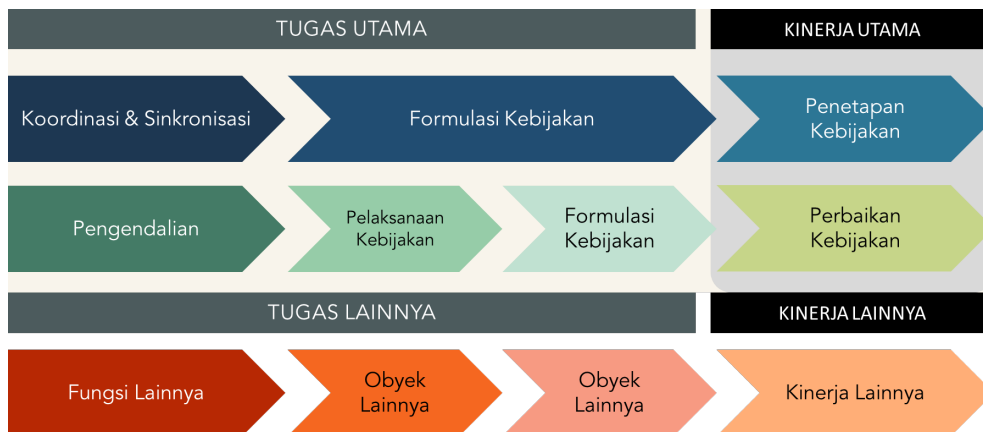
Sumber: Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024

B. Target Kinerja

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijelaskan bahwa Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada unit Eselon I, sesuai dengan kewenangannya pada pasal 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan terdapat dua fungsi yaitu :

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman;
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman.

Selain kedua fungsi tersebut, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.



Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha, dan pertambangan secara optimal.

Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis sisi mitra (*stakeholder*) yang akan merupakan manfaat dan dampak (*impact*). Lalu, kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, seperti terlihat pada Gambar 2.2.

DARI KEBIJAKAN KE INDIKATOR MAKRO STRATEGIS



Gambar 2.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada Gambar 2.3 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputy). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rancangan kebijakan deputy. Rancangan kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputy, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rancangan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.



Gambar 2.3 Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Output rancangan kebijakan pada tingkat Kedeputian dapat berupa dokumen ringkasan kebijakan dan rancangan kebijakan. Dalam hal sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa :

- Rancangan peraturan perundang – undangan;
- Rancangan kelembagaan;
- Rancangan perencanaan program;
- Rancangan kebijakan yang terkait;
- Rancangan kebijakan lainnya seperti rancangan kertas posisi, rancangan buku putih dan rancangan dokumen lainnya yang relevan.

Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa rancangan keputusan. Selanjutnya dokumen rancangan kebijakan ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Koordinator dalam menerbitkan rekomendasi dan/atau menetapkan kebijakan.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
Stakeholder Perspective								
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60	56	51	45	40
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%	46,2%	47,4%	48,5%	49,67 %
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%
Customer Perspective								
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari	6 Hari	6 Hari	4 Hari	3 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%	85%	90%	90%	90%
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	85%	90%	90%	90%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%

	pertambangan		terhadap PDB					
Internal Business Process Perspective								
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%	100%	100%	100%	100%
Learning And Growth Perspective								
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	80%	85%	85%	90%
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60	65	70	75	80
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65	67	70	75	80
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70	75	80	85	90

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya memiliki lima tujuan. Pertama, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Kedua, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2020, dengan tujuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan Agustus 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*); (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.

Pada bagian dari *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS yang terdiri dari 1 (satu) IKU. SS tersebut, yakni tersedianya efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan dengan IKU-nya, yaitu persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri.

Pada bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS. SS yang pertama adalah tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yakni persentase pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. SS yang kedua adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan yang baik, yakni (1) Nilai PMPRB Deputi dan (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi. Kemudian SS yang ketiga adalah terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan IKU-nya, yakni nilai IKPA Deputi.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020

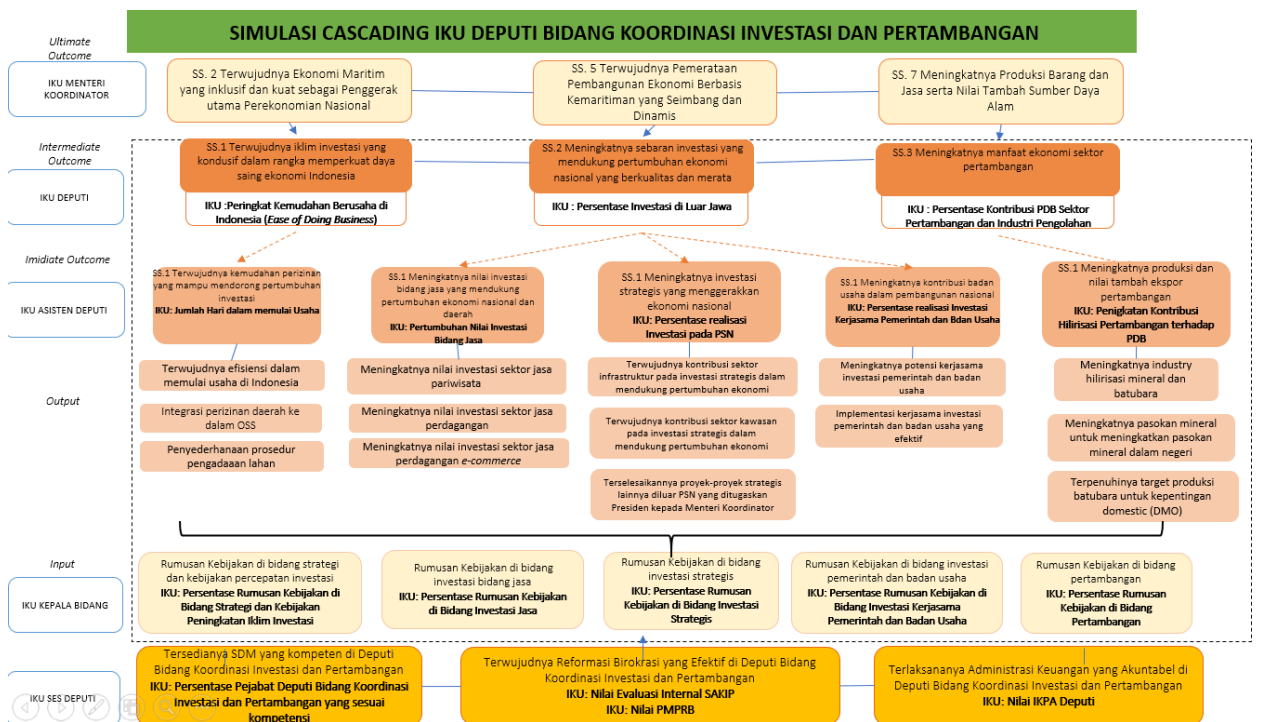
NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi 20ector pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%
Internal Business Process Perspective				
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%
Learning And Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2020	
SS.1 1	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputi	60
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	65
SS.1 2	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputi	70

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2020.

D. Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, setiap unit kerja mempunyai indikator kinerja utama. Selanjutnya penjabaran indikator kinerja Eselon I dijabarkan kedalam indikator kinerja eselon dibawahnya, penjabaran ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja dalam pencapaian tujuan. Simulasi capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Simulasi Cascading IKU Deputi Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*)

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa

IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan persentase investasi di luar Jawa yang dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 4: Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha

IKU 4 dihitung dengan cara membandingkan jumlah hari dalam memulai usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 5: Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa

IKU 5 dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan nilai investasi bidang jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 6: Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

IKU 6 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 6 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 7: Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

IKU 7 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB

IKU 8 dihitung dengan cara membandingkan peningkatan kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 8 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri

IKU 9 dihitung dengan cara membandingkan rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan kebijakan yang dijadikan kebijakan Menteri dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 10: Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

IKU 10 ini dihitung sesuai persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 10 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 11: Nilai PMPRB Deputy

IKU 11 ini dihitung sesuai nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 11 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 12: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy

IKU 12 ini dihitung sesuai nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 12 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 13: Nilai IKPA Deputi

IKU 13 ini dihitung sesuai nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 13 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2020, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan 12 (dua belas) SS dengan empat perspektif pendekatan *balance scorecard* (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 3 (tiga) SS yang merupakan bagian dari *Stakeholder Perspective* dan terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yaitu (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*), (2) Persentase Investasi di Luar Jawa, (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Pada *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) IKU, yakni: (1) Jumlah Hari dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa; dan (3) Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha; (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS dengan satu IKU yaitu : Persentase Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri. Terakhir, pada *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS dan

terdiri dari 1 (satu) IKU pada SS kesepuluh yaitu Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai , 2 (dua) IKU pada SS kesebelas yaitu (1) Nilai PMRB Deputy; (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy, dan 1 (satu) IKU pada SS keduabelas yaitu : Nilai IKPA Deputy.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Untuk Periode Triwulan IV Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN			REALISASI
			2020	Q3	Q4	
Stakeholder Perspective						
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60	-	73
SS.2	Meningkatnya sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%	-	49,7%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%	-	26,02%
Customer Perspective						
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4.	Jumlah Hari dalam memulai Usaha	8 Hari	-	13
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	-	22%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%	-	87,5%
SS.7	Meningkatnya	7.	Persentase Realisasi	85%	-	60%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI
	Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional		Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8% - 0,79%
Internal Business Process Perspective				
SS.9	Efektivitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijasikan sebagai Kebijakan Menteri	100% - 100%
Learning And Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10.	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi jabatan	80% - 80%
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik	11.	Nilai PMRB Deputi	60 - 91,40
		12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	65 - 65,31
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13.	Nilai IKPA Deputi	70 - 97,03

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis (SS). Pada Level *Stakeholder Perspective* yaitu SS.1 IKU 1 terdapat target Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*) sebesar 60, pada SS.2 IKU 2 terdapat target Persentase Investasi di Luar Jawa 45,6%, pada SS.3 IKU 3 terdapat target Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Pada Level *Customer Perspective* yaitu SS.4 IKU 4 terdapat target Jumlah Hari dalam Memulai Usaha selama 8 Hari; SS.5 IKU 5 terdapat target

Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa sebesar 3%; SS.6 IKU 6 terdapat target Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 85%; SS.7 IKU 7 terdapat target Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 85%; SS.8 IKU 8 terdapat target Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB sebesar 0,8%. Pada level *Internal Business Process Perspective* yaitu SS.9 IKU 9 terdapat target Persentase Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri sebesar 100%. Terakhir, pada level *Learning and Growth Perspective* yaitu SS.10 IKU 10 Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai sebesar 80% , SS.11 IKU 11 terdapat target Nilai PMRB Deputy sebesar 60; SS.11 IKU 12 dengan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy sebesar 65, dan SS.12 IKU 12 dengan target Nilai IKPA Deputy sebesar 70.

Pada saat berakhirnya Tahun 2020 ini dilaporkan bahwa seluruh sasaran strategis dan target IKU datanya dapat diperoleh dan telah dilaksanakan pengukuran, mulai dari *stakeholder* hingga *learning and growth perspective*, capaian kinerja sasaran strategis dan target IKU dijelaskan lebih detil pada poin B berikut.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:

STAKEHOLDER PERSPECTIVE

Stakeholder Perspective adalah perspektif pemangku kepentingan yang merupakan pihak yang terkait langsung dengan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada. Sesuai dengan yang telah diinput kedalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) nilai capaian pada *Perspective* ini yaitu sebesar 97,23 persen. Pada *stakeholder* perspektif ini terdapat 3 Sasaran Strategis yang menggambarkan manfaat keluaran antara lain:

1. Sasaran Strategis 1 yaitu **Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia**, dengan Indikator yang ditetapkan yaitu **Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia**;
2. Sasaran Strategis 2 yaitu **Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata** dengan Indikator ditetapkan yaitu **Persentase Investasi di Luar Jawa**;
3. Sasaran Strategis 3 yaitu **Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Persentase Kontribusi PDB Sektor pertambangan dan Industri pengolahan**;

Ketiga sasaran strategis tersebut disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu

“Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam”, hal ini sebagaimana juga tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024.

CUSTOMER PERSPECTIVE

Customer Perspective adalah apa yang seharusnya dihasilkan untuk pengguna jasa Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, dalam hal ini Menteri Koordinator dan Kementerian/lembaga dibawah koordinasi yang merupakan pengguna jasa (customer) langsung. Capaian kinerja pada *Customer Perspective* yaitu sebesar 96,66 persen. Perspektif ini terdiri dari 5 Sasaran Strategis dimana masing-masing SS memiliki satu Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan terkait SS diuraikan sebagai berikut:

4. Sasaran Strategis 4 yaitu **Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi** dengan indikator **Jumlah Hari dalam Memulai Usaha**;
5. Sasaran Strategis 5 yaitu **Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah** dengan indikator yang ditetapkan **Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa**;
6. Sasaran Strategis 6 yaitu **Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)**;
7. Sasaran Strategis 7 yaitu **Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional** dengan indikator yang ditetapkan yaitu **Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha**;
8. Sasaran Strategis 8 yaitu **Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah **Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB**;

Untuk mendukung sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka ditetapkanlah sasaran program pada *customer perspective* yang menggambarkan kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

INTERNAL BUSINESS PERSPECTIVE

Internal Business Perspective adalah suatu proses kunci yang dilaksanakan organisasi untuk memberikan kontribusi kepada pengguna jasa sesuai dengan sasaran strategis pada Customer Perspective. Pada perspektif ini keluaran yang dihasilkan berupa ringkasan dan/atau rekomendasi kebijakan sesuai dengan isu-isu yang menjadi fokus Deputi. Capaian kinerja yang dicapai yaitu sebesar 100 persen. Pada perspektif ini terdiri dari 1 Sasaran Strategis (SS) dan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS Internal Business Perspective dijelaskan sebagai berikut:

9. Sasaran Strategis 9 merupakan *Internal Process Perspective*, yaitu **Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan**, dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman. Secara berurutan hasil keluaran dari Eselon II yaitu Kertas Kerja Kebijakan (Policy Paper) dimana sesuai dengan Pasal 17 ayat (2). Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) yang merupakan keluaran Pejabat Eselon I sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) . Selanjutnya untuk keluaran dari Menteri Koordinator adalah Rekomendasi Kebijakan untuk kemudian disampaikan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga jika Menteri Koordinator tidak memiliki mandate dan/atau kewenangan yang cukup dalam penanganan isu dimaksud hal ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2);

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Learning and Growth Perspective adalah langkah yang harus dilakukan dalam hal pengembangan organisasi, kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), system informasi, reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan juga terkait dengan fasilitas dan anggaran yang digunakan untuk mendukung kinerja organisasi. Capaian kinerja yang dicapai yaitu sebesar 110,83 persen. Perspektif ini terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penjelasan SS pada perspektif ini dijelaskan sebagai berikut:

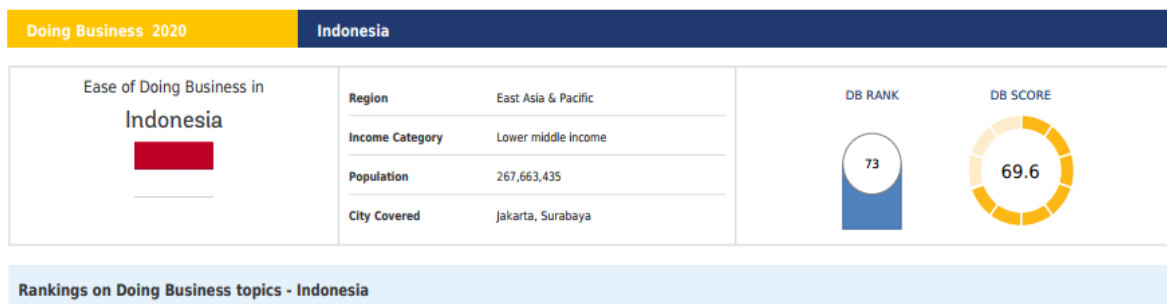
10. Sasaran Strategis 10 yaitu tersedianya **SDM yang Kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan adalah Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan. Sasaran Strategis ini merupakan;
11. Sasaran Strategis 11 yaitu **Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik**, sasaran strategis ini terdiri dua indikator yang ditetapkan yaitu Nilai PMPRB Deputi dan Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi;
12. Sasaran Strategis 12 yaitu **Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan** dengan Indikator yang ditetapkan yaitu Nilai IKPA Deputi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran program Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka disusun upaya-upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan pada *internal business* dan *learning & growth perspective*.

C. Capaian Indikator Kinerja Utama

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga terkait dengan capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian capaian indikator kinerja utama dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja pada tahun berjalan. Adapun capaian indikator kinerja utama triwulan III Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 : Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*) sesuai dengan rilis dari Bank Dunia, peringkat Indonesia tetap pada angka 73, tetapi mencatatkan peningkatan skor pada indeks dari 67,96 menjadi 69,6. Peringkat EODB ini tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh kendala dalam regulasi perizinan sehingga pemodal harus mengajukan izin yang berbeda-beda baik tingkat Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga.



Sumber: Laporan EODB

Gambar 3.1 *Rangking Ease Of Doing Business*

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa, data nilai investasi di luar Jawa dihitung berdasarkan rilis dari BKPM RI, capaian dilakukan pengukuran pada TW IV. tercapai dengan realisasi sebesar 49,70 % dari target yang ditetapkan sebesar 45,60%. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain dikarenakan pembangunan infrastruktur pendukung yang telah dan sedang dibangun sehingga lokasi tersebut siap untuk dijadikan sebagai lokasi investasi bagi para pemodal.

Tabel 3.2 *Realisasi Investasi Januari – September 2020*

Nilai Realisasi Jan-Sep 2020								
Periode	TW I		TW II		TW III		Jan - Sep	
	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%
Jawa	108.3	51.4%	100.6	52.4%	98.6	47.2%	307.5	50.3%
Luar Jawa	102.4	48.6%	91.3	47.6%	110.4	52.8%	304.1	49.7%
Total	210.7	100.0%	191.9	100.0%	209.0	100.0%	611.6	100.0%

Sumber: Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM RI

IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan, dihitung berdasarkan rilis dari BPS, pada kuartal II TA 2020 kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan menjadi 6,28 persen dari sebelumnya 7,39 persen pada kuartal yang sama tahun 2019. realisasi pada TW IV yaitu 26.02 % dari target yaitu 27,10%, hal ini sesuai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data PDB TW III tahun 2020 yaitu PDB Pertambangan dan Penggalian ditambah dengan PDB Industri Pengolahan.

Tabel 3.3. Perhitungan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	[Seri 2010] Distribusi PDB Triwulanan Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
B. Pertambangan dan Penggalian	6,82	6,28	6,16
C. Industri Pengolahan	19,98	19,86	19,86

Sumber: Badan Pusat Statistik

IKU 4: realisasi pada TW IV yaitu 13 hari dari 8 hari target yang ditetapkan hal ini sesuai dengan laporan EODB yang diterbitkan World Bank. Faktor yang menjadi perhatian dan perbaikan yang harus dilakukan yaitu terkait dengan regulasi perizinan.

✓ Starting a Business (rank)	140
Score of starting a business (0-100)	81.2
Procedures (number)	11
Time (days)	13
Cost (number)	5.7
Paid-in min. capital (% of income per capita)	0.0

Sumber: Laporan EODB

Gambar 3.2. Starting a Business

IKU 5: perhitungan realisasi investasi bidang jasa dihitung berdasarkan data realisasi Investasi yang dikeluarkan oleh BKPM RI. Realisasi Investasi Bidang Jasa mencapai 22% dari target 3% yang ditetapkan. Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa diperoleh dengan menghitung Nilai Investasi bidang jasa tahun 2020 (data QW III 2020) dikurangi dengan Nilai Investasi jasa tahun 2019 QW IV dan dibagi dengan Nilai Investasi jasa tahun 2019.

Tabel 3.4. Total Investasi Sektor Tersier (Jasa), Perdagangan, Pariwisata, dan Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi pada Tahun 2018-kuartal III 2020

Total	2018	2019	9M2019	9M2020
Sektor Tersier (Jasa)	191666,5	250300,8	179270,9	218910,5
Perdagangan	7039,103	14084,11	10807,47	13680,12
Pariwisata	9965,205	16788,96	12638,6	7872,922
Transportasi, Pergudangan, Komunikasi	61766,99	72810,32	49006,68	75562,54

Sumber: BKPM RI

IKU 6: Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional dengan realisasi sebesar 87,5 % dari target yang ditetapkan 85%. Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional meliputi beberapa tahapan, mulai dari perencanaan hingga terlaksana 100%. Sesuai dengan metode dan formula yang ditetapkan oleh KPPIP, realisasi investasi PSN dihitung dengan membandingkan realisasi investasi dengan target yang ditetapkan oleh KPPIP dan selanjutnya dikalikan 100%.

Tabel 3.5. Persentase Realisasi Investasi Proyek Strategis Nasional

No	Proyek	Target	Realisasi	Presentase	Sumber
	Sektor Infrastruktur	8	8	100%	KPPIP
1	Jalan Tol Pandaan – Malang (37,62km)				
2	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (131,5km) - bag dari 8 ruas Trans Sumatera				
3	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo				
4	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)				
5	Bendungan Tuku				
6	Bendungan Tapil				
7	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung**				
8	Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar (38,3km)**				
	Sektor Kawasan	4	3	75%	KPPIP
9	Kawasan Industri Ketapang				
10	Kawasan Industri Konawe				
11	Kawasan Industri Wilmar Serang				
12	KEK Maloy				
Persentase Realisasi Investasi PSN tahun 2020			87,5%		

IKU 7: Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Kerjasama pemerintah dan badan ushaa merupakan bentuk perjanjian antara sector publik (Pemerintah) dengan sector privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan public yang diikat dengan perjanjian, terbagi dalam beberapa bentuk kontrak dan permbagian resiko dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur. Proyek KPBU juga melibatkan beberapa Kementerian dalam pelaksanaannya, yaitu Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan BKPM RI, sebagai wadah koordinasi maka dibentuklah Kantor Bersama KPBU.

Pada tahun 2020, proyek KPBU yang direncanakan untuk ditandatangani perjanjian kerjasamanya berjumlah 5, saat tahun anggaran berakhir telah tercapai

3 proyek yang telah dilaksanakan, adapun realisasi yang dicapai sebesar 60% dari target 85% yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

IKU 8: Target kontribusi industri logam dasar terhadap PDB pada 2020 adalah 0,8%. Realisasi kontribusi hingga Triwulan III Tahun 2020 adalah 0,79%. Beberapa hal sangat mempengaruhi penurunan target yaitu kondisi pandemik Covid-19, pembatasan aktivitas termasuk industri manufaktur, permintaan ekspor bahan baku dan produk logam dasar menurun.

Tabel 3.6. Realisasi Kontribusi Industri Logam Dasar terhadap PDB

Periode	Kontribusi
Triwulan I	0,78
Triwulan II	0,76
Triwulan III	0,79

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Realisasi yang dicapai pada tahun 2020 yaitu 100%, seluruh unit telah menyampaikan Kertas Kerja Kebijakan yang merupakan keluran Asisten Deputy dan Ringkasan Kebijakan yang merupakan keluaran Deputy. Dokumen rancangan kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dihasilkan terdiri dari 14 Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) dan 1 Rancangan Peraturan Presiden.

IKU 10: Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan pengukuran akan dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena indikator tersebut merupakan turunan langsung dan pengukuran dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh hasil 86% dari target yang ditetapkan yaitu 80%.

IKU 11: Nilai PMPRB Deputy. Kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dilaksanakan pada bulan Juni 2020. Hasil penilaian assessor unit eselon I, Tim Penilai Internal (Inspektorat) Bersama Tim RB Biro Hukum telah melakukan validasi terhadap data dukung yang disampaikan yaitu diperoleh nilai 33,19 (91,4%). Capaian nilai PMPRB merupakan hasil penilaian mandiri yang nantinya akan dievaluasi kembali oleh Tim Evaluator Kementerian PAN & RB.

IKU 12: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Evaluasi dilakukan pada tiga komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Adapun hasil yang diperoleh yaitu 65,31 atau dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B.

Tabel 3.7 . Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020

No	Komponen	Hasil Evaluasi	
		Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	43	28,99
2.	Pengukuran Kinerja	36	19,23
3.	Pelaporan Kinerja	21	17,10
Nilai Hasil Evaluasi		100	65,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

IKU-13. Nilai IKPA Deputy. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Sesuai dengan pengukuran yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu 97,03 %.

Tabel 3.8 Nilai IKPA Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

	Keceuaan Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispencasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
Nilai	100.00	78.33	100.00	100	100.00	100.0	100.00	90.84	93.33	100	99.24	0.00	100.00	77.62	80%	97.03
Bobot	0	0	5	15	8	0	5	15	12	10	5	0	5			
Nilai Akhir	0.00	0.00	5	15	8	0	5	13.46	11.20	10	4.96	0.00	5			

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada DIPA awal yang terbit pada bulan Agustus 2020 berjumlah Rp10.000.000.000,-, dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran terutama untuk perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana unit kerja baru di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilaksanakan penghematan dan pemotongan anggaran sejumlah Rp4.005.982.363,-. Penghematan dan pemotongan anggaran tersebut dialihkan ke Sekretariat Kemenko Marves untuk memenuhi kebutuhan anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Pada bulan November 2020, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp600.000.000,- yang berasal dari Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, sehingga total anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yaitu Rp 6.594.017.000,-.

Hingga tanggal 31 Desember 2020 realisasi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar Rp 6.243.620.576,- atau sebesar 94,69 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6.594.017.000.

Berdasarkan unit kerja Eselon II, realisasi anggaran di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar Rp2.151.728.870,- atau 98,07% dari total anggaran sebesar Rp2.194.017.000,- kemudian Asisten Deputy Investasi Strategis dengan realisasi 879.797.855 atau sebesar 97,76% dari total anggaran Rp900.000.000,-. Asisten Deputy Pertambangan dengan capaian realisasi anggaran Rp744.625.654,- atau sebesar 93,08% dari total anggaran Rp800.000.000,-. Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa sebesar Rp695.929.570,- atau sebesar 92,79% dari total anggaran sebesar Rp750.000.000,-. Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi dengan realisasi anggaran Rp864.127.489,- atau sebesar 90,96% dari total anggaran Rp950.000.000,-. Dan yang terakhir yaitu Asisten Deputy Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp907.411.138,- atau sebesar 90,74 persen dari total anggaran sebesar Rp1.000.000.000,-. Pagu dan realisasi anggaran unit eselon II lingkup Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan per 31 Desember 2020 disajikan lengkap pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II
di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Per 31 Desember 2020

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	950.000.000	864.127.000	85.872.000	90,96%
Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	750.000.000	695.929.570	54.070.430	92,79%
Asisten Deputi Investasi Strategis	900.000.000	879.797.855	20.202.145	97,76%
Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	1.000.000.000	907.411.138	92.588.862	90,74%
Asisten Deputi Pertambangan	800.000.000	744.625.654	55.374.346	93,08%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	2.194.017.000	2.151.728.870	42.288.130	98,07%
Jumlah	6.594.017.000	6.243.620.576	350.396.424	94,69%

Sumber: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan, 2020

Realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah. *Kedua*, kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan *stakeholder* di daerah yang terkena dampak pandemi. *Ketiga*, jumlah SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai capaian pada *Stakeholder Perspective* sebesar 97,23 persen, *Customer Perspective* sebesar 96,66 persen, *Internal Business Perspective* sebesar 100 persen dan *Learning and Growth Perspective* sebesar 110,83 persen. Capaian rata-rata kinerja organisasi atau unit mencapai 101,18 persen.
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 12 sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diukur keberhasilannya dengan 13 indikator kinerja utama. Dari 13 indikator kinerja utama sebanyak 8 indikator tercapai melebihi target dan 5 indikator belum tercapai.
3. Indikator yang belum tercapai sebanyak 2 indikator pada *stakeholder perspective* dan 3 indikator pada *customer perspective*. Sedangkan untuk *internal business perspective* dan *learning and growth perspective* seluruh tercapai. Capaian indikator yang belum memenuhi target antara lain:
 - a. Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (EODB) dari target peringkat 60 masih stagnan di peringkat 73;
 - b. Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan dari target 27,10 persen tercapai 26,02 persen;
 - c. Jumlah hari dalam memulai usaha dari target 8 hari tercapai 13 hari;
 - d. Persentase realisasi investasi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dari target sebesar 85 persen tercapai 60 persen;
 - e. Peringkat kontribusi hilirisasi pertambangan terhadap PDB dari target 0,80 tercapai 0,79.
4. Dari sisi kinerja keuangan, dapat disampaikan realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar Rp 6.243.620.576,- atau sebesar 94,69 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 6.594.017.000. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja unit sebesar 101,18 persen, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan cukup efisien karena dengan anggaran yang lebih kecil dapat menghasilkan kinerja yang lebih tinggi.
5. Realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator

Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan Covid-19 yang menjadi fokus pemerintah. *Kedua*, kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan *stakeholder* di daerah yang terkena dampak pandemi. *Ketiga*, jumlah SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.

Analisa terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020, belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja dan realisasi kegiatan maupun anggarannya dengan capaian tahun sebelumnya, dan juga keseluruhan Sasaran Strategis merupakan hal yang baru dan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai penyelesaian komponen kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang semuanya dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2020.

Beberapa permasalahan dan kendala dalam pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan Tahun 2020, antara lain:

1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal dalam pelaksanaannya;
2. Jumlah SDM baik itu pejabat dan staf Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan masih kurang dan terdapat beberapa jabatan strategis yang masih kosong;
3. Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dalam pencapaian kinerja maupun indikator yang merupakan indikator outcome dari Kementerian/Lembaga lain dikarenakan oleh kondisi Pandemi Covid-19 serta kebijakan Pemerintah yang membatasi kegiatan perkantoran yang turut berpengaruh pada kegiatan yang sudah diagendakan sebelumnya.

Adapun terhadap beberapa kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Deputi bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan reuiu dan evaluasi terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada Tahun 2020;
2. Menyesuaikan kembali target-target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan mengacu capaian kinerja Tahun 2020;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang berada dibawah koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dan juga unit kerja lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan;

4. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sehingga kegiatan masing- masing Asisten Deputi dapat dilaksanakan secara serentak pada lokasi yang sama. Hal ini untuk menghindari jadwal yang bersamaan waktunya, menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, meniyasati kekurangan personil pelaksana kegiatan dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran;
5. Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. Kegiatan yang merupakan perintah dan arahan baru agar dapat dicarikan keterkaitannya dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA-K/L sehingga dapat diukur dan menjadi bagian dari pencapaian IKU;
6. Perbaikan pada proses administrasi keuangan minimal pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu. Selain itu perlu didorong adanya SOP serupa dan panduan administrasi keuangan pada level Kuasa Pengguna Anggaran sehingga waktu dan persyaratan administrasi keuangan menjadi jelas dan terukur.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Septian Hario Seto
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Luhut B. Pandjaitan
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020

PIHAK KEDUA,

Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,

Septian Hario Seto 

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

TARGET KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
Stakeholder Perspective				
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	60
SS.2	Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%
Customer Perspective				
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	0,8%
Internal Business Perspective				
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	100%
Learning & Growth Perspective				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	80%

SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp 1.500.000.000,-
2	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Rp 1.500.000.000,-
3	Koordinasi Investasi Strategis	Rp 1.500.000.000,-
4	Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp 1.500.000.000,-
5	Koordinasi Pertambangan	Rp 1.500.000.000,-
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp 2.500.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp 10.000.000.000,-

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator
Bidang Kematriman dan Investasi RI,


Luhut B. Pandjaitan

Deputy Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan,


Septian Hario Seto

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)	1. Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)				✓
2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	2. Investasi di Luar Jawa				✓
3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	3. PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan				✓
4.	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	4. Kemudahan Berusaha di Indonesia (<i>Ease of Doing Business</i>)				✓
5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	5. Investasi Bidang Jasa				✓
6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	6. Investasi Strategis				✓
7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	7. Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha				✓
8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	8. Hilirisasi Pertambangan				✓
9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	9. Rancangan Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan				✓
		10. Rancangan Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi				✓
		11. Rancangan Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa				✓
		12. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa				✓
		13. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa				✓
		14. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Bidang Jasa				✓
		15. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis				✓

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		16. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis				✓
		17. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Strategis				✓
		18. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		19. Rancangan Koordinasi Kebijakan Implementasi Penjajakan Minat Pasar Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		20. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		21. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral				✓
		22. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara				✓
		23. Rancangan Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara				✓
10.	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	24. SDM yang sesuai Kompetensinya				✓
11.	Nilai PMPRB Deputy	25. Nilai PMPRB Deputy				✓
12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	26. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
13.	Nilai IKPA Deputy	27. Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Koordinasi
Investasi dan Pertambangan



Septian Hario Seto 

LAMPIRAN II CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN ANGGARAN 2020

Stakeholder Perspective

Perspektif : Stakeholders Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 97.23

S01DVI : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia | Bobot : 11.11 | Capaian : 89.17

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S01DVI Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia	Take Last Known Value	11.11	60.00	73.00	89.17% ▼	

S02DVI : Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata | Bobot : 11.11 | Capaian : 104.5

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S02DVI Persentase Investasi di Luar Jawa	Take Last Known Value	11.11	45.60	49.70	104.50% ▲	

S03DVI : Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan | Bobot : 11.11 | Capaian : 98.01

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S03DVI Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	Take Last Known Value	11.11	27.10	26.02	98.01% ▲	

Customer Perspective

Perspektif : Customer Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 96.66

S04DVI : Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi | Bobot : 6.06 | Capaian : 68.75

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S04DVI Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	Take Last Known Value	6.06	8.00	13.00	68.75% ▼	

S05DVI : Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah | Bobot : 9.09 | Capaian : 120

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S05DVI Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	Take Last Known Value	9.09	3.00	22.00	416.67% ▲	120.00

S06DVI : Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional | Bobot : 9.09 | Capaian : 101.47

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S06DVI Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	Take Last Known Value	9.09	85.00	87.50	101.47% ▲	

S07DVI : Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional | Bobot : 9.09 | Capaian : 85.29

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S07DVI Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	Take Last Known Value	9.09	85.00	60.00	85.29% ▲	

S08DVI : Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan | Bobot : 6.06 | Capaian : 99.38

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S08DVI Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	Take Last Known Value	6.06	0.80	0.79	99.38% ▲	

Internal Business Process

Perspektif : Internal Business Process Perspective | Bobot : 100.00 | Capaian : 100

S09DVI : Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan | Bobot : 3.03 | Capaian : 100

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S09DVI Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	Average	3.03	100.00	100.00	100.00% ▲	

Learning And Growth Perspective

Perspektif : Learning & Growth | Bobot : 100.00 | Capaian : 110.83

S10DVI : Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan | Bobot : 6.06 | Capaian : 103.75

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S10DVI Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Take Last Known Value	6.06	80.00	86.00	103.75% ▲	

S11DVI : Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan yang Baik | Bobot : 12.12 | Capaian : 110.12

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S11DVI Nilai PMPRB Deputi	Take Last Known Value	6.06	60.00	91.40	126.17% ▲	120.00
+ S11DVI Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	Take Last Known Value	6.06	65.00	65.31	100.24% ▲	

S12DVI : Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan | Bobot : 6.06 | Capaian : 119.31

Nama IKU	Konsolidasi Periode	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Toleransi Capaian
+ S12DVI Nilai IKPA Deputi	Take Last Known Value	6.06	70.00	97.03	119.31% ▲	

LAMPIRAN III

REALISASI KOMPONEN KEGIATAN PERIODE TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Penelitian Usulan Revisi Anggaran (DIPA) berdasarkan SOTK baru Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi : Kegiatan penelitian usulan Revisi Anggaran (DIPA) SOTK baru dilaksanakan untuk mempercepat proses perubahan dan alokasi anggaran setiap unit kerja , yang selanjutnya akan dilakukan penelahaan dan penelitian sesuai deng Renja masing-masing unit kerja dan juga sebagai bahan pelaksanaan reviu oleh Inspekorat	9 Juli 2020	10 Juli 2020	Swiss Bell Hotel Bogor	-	-

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021: kegiatan bertujuan untuk menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2021 berdasarkan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan</p>	20 Juli 2020	22 Juli 2020	101 Hotel Bogor		
		<p>Menghadiri Reviu RKA-K/L Kemenko Maritim dan Investasi Tahun Anggaran 2021: Kegiatan ini bertujuan untuk mereviu kembali usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Deputi yang telah disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.</p>	22 Juli 2020	24 Juli 2020	101 Hotel Bogor		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Sosialisasi Hibah Luar Negeri di lingkungan Kemenko Marves: kegiatan dilaksanakan sebagai salah satu langkah penyampaian informasi terkait dengan proses, prosedur, petunjuk pelaksanaan Hibah Luar Negeri kepada Kementerian/Lembaga atau Instansi. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan</p>	10 Juli 2020	12 Juli 2020	Grand Zury Hotel, BSD		
		<p>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020: kegiatan dilaksanakan dalam rangka memonitor pencapaian Program Prioritas dan <i>Quick Wins</i> yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja</p>	22 Oktober 2020	24 Oktober 2020	El Royale Hotel, Bandung		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Kegiatan EITI TA 2021: kegiatan bertujuan untuk melengkapi data dukung yang diperlukan untuk pengusulan alokasi tambahan anggaran untuk kegiatan EITI TA 2021.	25 Juni 2020	25 Juni 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		Rapat Persiapan Dokumen untuk penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020: kegiatan bertujuan untuk membahas persiapan dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Staf di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.	30 September 2020	30 September 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Penyusunan Manual Indikator dan Pemetaan Kegiatan pada Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan: kegiatan dilaksanakan untuk menyusun dokumen kinerja yang akan diinput pada aplikasi SIK-M yang salah satunya yaitu manual IKU sebagai dokumen untuk melakukan pengukuran kinerja.</p>	5 Oktober 2020	5 Oktober 2020	RR Lantai 4, Kemenko Marves		
		<p>Rapat Finalisasi Penyusunan Renstra Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan: kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024</p>	1 Juli 2020	1 Juli 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Rapat Pembahasan Program Kerja Asisten Deputi dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</p> <p>pembahasan program kerja dilaksanakan sebagai upaya untuk identifikasi dan pemetaan program kerja masing-masing unit kerja yang akan dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan</p>	13 Juli 2020	13 Juli 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<p>Pembahasan Peta Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</p> <p>Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan peta strategis Deputi yang akan dijadikan dokumen kinerja</p>	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Rapat Pembahasan Major Project di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan: merupakan tindak lanjut dari rapat pembahasan gugus tugas <i>Delivery Assurance Unit</i> dimana Kementerian Koordinator menjadi verifikator dalam penilaian capaian <i>major project</i> dalam aplikasi Sismonev 2.0 KSP</p>	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<p>Rapat Penyusunan Videografis Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan: sebagai salah satu dokumentasi capaian pelaksanaan kegiatan dan project yang di koordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan</p>	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	RR Lantai 21, Kemenko Marves		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Bimbingan Teknis Pengenalan Infografis: dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terutama terkait pembuatan materi presentasi berdasarkan infografis	25 Agustus 2020	25 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi dan Permasalahan Investasi pada Sektor Jasa Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan: merupakan salah satu upaya untuk mengenali potensi dan permasalahan terkait sector jasa pariwisata terutama untuk wilayah sekitar Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi wisata baru	26 Agustus 2020	28 Agustus 2020	Kantor Pemkab Humbang Hasundutan		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Percepatan Reformasi Birokrasi dan Penyempurnaan SAKIP (Benchmark pelaksanaan Implementasi SAKIP) di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi: kegiatan dilaksanakan untuk melakukan penyempurnaan SAKIP Kemenko Marves dengan studi banding/benchmark dengan Pemkab Banyuwangi yang mendapatkan Nilai A dalam penilaian SAKIP Men PAN RB	8 Oktober 2020	10 Oktober 2020	Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi		
		Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan Narasi Pada Draft Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode Ke 2 2020-2024	4 November 2020	4 November 2020	Harris Hotel Sentul, Bogor		
		Rapat Persiapan Pelaksanaan Monev SDGs	3 Desember 2020	5 Desember 2020	Aston Bogor Hotel & Resort, Bogor		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Sinergitas Antar Kemenko Mendukung Indonesia Maju	27 November 2020	29 November 2020	Pullman Hotel, Bandung		
		Persiapan Pertanggung jawaban Keuangan Akhir Tahun 2020 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	3 Desember 2020	5 Desember 2020	101 Hotel Bogor		
		Millenials Talk Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	9 Desember 2020	11 Desember 2020	Resinda Hotel Karawang, Jawa Barat		
		Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	25 November 2020	26 November 2020	Aston Lake Hotel Sentul, Bogor		
		Monitoring TW IV SIK-M di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	28 Desember 2020	29 Desember 2020	Margo Hotel Depok, Jawa Barat		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Kerja Penguatan Sinergitas dan Peningkatan Kualitas Program Kerja dan Kegiatan di Bidang Investasi dan Pertambangan	11 Desember 2020	14 Desember 2020	Tanah Gajah Resort Hotel, Bali		
		Persiapan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun 2020 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	3 Desember 2020	4 Desember 2020	101 Hotel Bogor, Jawa Barat		
		Koordinasi Pelaksanaan Rapat Kerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	25 November 2020	27 November 2020	Provinsi Bali		
2	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Kunjungan Inventarisasi Masalah Hambatan Investasi dan Percepatan Proyek Pengembangan Pelabuhan Batang: kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir masalah dan hambatan investasi dan percepatan proyek pengembangan pelabuhan	13 September 2020	16 September 2020	Pelabuhan Batang, Jawa Tengah	-	

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Batang					
		Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumut: kegiatan dilaksanakan sebagai langkah dalam percepatan dan pengawasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta penyelesaian masalah di ruas tol yang akan dibangun	22 September 2020	26 September 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumsel: kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir dan penyelesaian masalah di proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Simpang Indralaya-Muaraenim	29 September 2020	2 Oktober 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumbar: kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir dan penyelesaian masalah di proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Padang-Sicincin	6 Oktober 2020	9 Oktober 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		Kunjungan Kerja Kepala BNPB_Satgas Covid-19 Di Gorontalo, Manado, Biak Dan Denpasar: pendampingan kunjungan Kepala BNPB/Satgas Covid 19 di 4 lokasi	6 Oktober 2020	9 Oktober 2020	Gorontalo, Manado, Biak, dan Denpasar		
		Rakor Pengonsepan Pasal Pembekuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dalam Revisi PMK Nomor 150 Tahun 2018: dilaksanakan dalam rangka pengonsepan pasal pembekuan fasilitas pengurangan PPh Badan dalam Revisi PMK Nomor 150 Tahun 2018	6 Oktober 2020	7 Oktober 2020	101 Hotel Bogor		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Aktualisasi dan Sinkronisasi Data Lintas Kementerian Dari Hasil Rekapitulasi Kuesioner Smelter dan Surveyor: pembahasan data dan informasi yang dihimpun oleh Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel (HPM)	8 Oktober 2020	10 Oktober 2020	Four Points Bandung		
		Kunjungan Lapangan Jalan Tol Trans Sumatera	20 November 2020	24 November 2020	Sumatera Utara		
		Kunjungan Lapangan Jalan Tol Trans Sumatera	15 Oktober 2020	17 Oktober 2020	Bengkulu		
		Rapat Koordinasi dalam rangka Pembentukan Plan Action Penguatan Iklim Investasi yang Kondusif	4 November 2020	5 November 2020	Swissbel Hotel Intermark, BSD		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Site Visit PT Jindal Indonesia dalam Rangka Perlindungan Industri Baja Stainless dalam Menghadapi The Unfair Trade	29 September 2020	2 Oktober 2020	PT. Jindall Stailless Indonesia, Jawa Timur		
		Rapat Koordinasi Monev Penanganan COVID 19 di Jawa Tengah	5 November 2020	5 November 2020	Semarang, Jawa Tengah		
		Tinjauan lapangan Jalan Tol Trans Sumatera ke Palembang, OKI dan OI	12 November 2020	14 November 2020	Sumatera Selatan		
		Tinjauan lapangan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Medan-Binjai-Langsa, Indrapura-Kisaran, Tebing Tinggi-Parapat-Sobolga	25 November 2020	29 November 2020	Aceh, Sumatera Utara		
		Capacity Building terkait Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama	5 November 2020	7 November 2020	Hotel Hilton Bandung		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Workshop Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	9 November 2020	11 November 2020	Hotel Four Point Bandung		
3	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	<p>Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Sharing Session Percepatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung: kegiatan dilaksanakan dalam upaya pembahasan permasalahan pengembangan pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung</p> <p>Asistensi pada Ekspor Produk Jadi Timah untuk Tin Chemical dan Tin Solder: kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan kendala dan permasalahan dalam kegiatan produksi dan ekspor yang dilakukan oleh PT.Timah Industri</p>	6 Oktober 2020	11 Oktober 2020	Pelabuhan Belawan & Kuala Tanjung	-	-
			9 September 2020	12 September 2020	PT. Timah Industri, Cilegon		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p>Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi dan Permasalahan Investasi pada Sektor Jasa Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan: kegiatan dilaksanakan untuk membahas potensi permasalahan investasi sektor jasa pariwisata di Kab. Humbang Hasundutan</p>	26 Agustus 2020	29 Agustus 2020	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan		
		<p>Investment Dialogue antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda: kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan terkait General <i>Business Climate</i> dan <i>Update on Omnibus Bill</i></p>	1 Oktober 2010	1 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		<p>Rencana Investasi Budidaya Teripang di Kabupaten Lebak</p>	1 Desember 2020	1 Desember 2020	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Pembahasan Pembangunan Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung	18 Desember 2020	20 Desember 2020	Hotel Santika, Medan		
		<i>Financial Model dan Review Heads Of Agreement Among Three Parties</i>	10 Desember 2020	10 Desember 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Pembahasan Peluang dan Tantangan Investasi di Kabupaten Sumedang	23 Oktober 2020	23 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		<i>Investment Dialogue</i> antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Belanda	1 Oktober 2020	1 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Penyusunan Draft Perpres P4M	8 Oktober 2020	31 Desember 2020	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
4	Koordinasi Investasi Strategis	Koordinasi Rekomendasi KLHK terkait penetapan baterai lithium bekas yang bukan merupakan limbah B3: kegiatan dilaksanakan dengan fokus permasalahan yaitu tentang pengaturan pemanfaatan limbah baterai lithium dan terkait dengan impor bahan baku produk	18 Juni 2020	29 Juni 2020	Video Conference	-	-
		Rapat Pembahasan HS Code Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri: kegiatan dilaksanakan untuk membahas dan mengidentifikasi HS Code bagi baterai lithium bekas yang akan diimpor sebagai bahan baku industry sebagai persiapan untuk Finalisasi Revisi Permendag tentang Impor Baterai Lithium.	10 September 2020	10 September 2020	Video Conference		
		Rapat Pembahasan HS Code Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri: kegiatan dilaksanakan untuk membahas dan	15 September 2020	15 September 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		mengidentifikasi HS Code bagi baterai lithium bekas yang akan diimpor sebagai bahan baku industry sebagai persiapan untuk Finalisasi Revisi Permendag tentang Impor Baterai Lithium.					
		Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Impor Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri.	7 September 2020	7 September 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Pengolahan Limbah Baterai Lithium di Indonesia.	14 Juli 2020	14 Juli 2020	Video Conference		
		Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja pada Asisten Deputi Investasi Strategis.	31 Agustus 2020	2 September 2020	Grand Zuri Hotel, BSD		
		Focus Group Discussion Pengembangan Industri Farmasi di Indonesia	18 Juni 2020	2 Juli 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Usulan Pengembangan Industri Farmasi Khususnya Bahan Baku Obat	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Pengadaan OMAI ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional	23 September 2020	23 September 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Penerapan TKDN Sektor Farmasi	29 September 2020	29 September 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Pembahasan Program Prioritas, Strategi Implementasi dan Rencana Aksi Lingkup Asisten Deputi Investasi Strategis	9 September 2020	13 September 2020	East Park Hotel, DIY		
		Rapat Koordinasi Usulan Penurunan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi dan Penyesuaian WAPU BUMN Konstruksi	7 September 2020	7 September 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Usulan Penurunan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi dan Penghapusan WAPU	17 September 2020	17 September 2010	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		BUMN Konstruksi					
		Peninjauan Lapangan Status Proyek Investasi Pabrik Panel Surya LEN	30 September 2020	1 Oktober 2020	PT. LEN Industri, Bandung		
		Diskusi ALih Lahan Tambak PT.CPP ke BBWS untuk Kanal Inlet Outlet	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Penajaman Desain Klaster Industri Farmasi pada Kawasan Industri Terpadu Batang dan Industri Baterai lithium di Indonesia	3 Desember 2020	5 Desember 2020	Hyatt Regency Yogyakarta		
		Koordinasi Pembahasan Penanganan Jalan Jalur Horozontal Tengah Selatan, Jawa Barat Selatan	15 Oktober 2020	15 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Diskusi Update Kinerja Makro Investasi Fokus Proyek Prioritas Nasional Jawa Tengah dan Tinjauan Kinerja Kepatuhan Perpajakan	28 Oktober 2020	29 Oktober 2020	Provinsi Jawa Tengah		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Terkait Verifikasi dan Pemantauan Proyek Prioritas Strategis Nasional “Industri Karet”	13 Oktober 2020	13 Oktober 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Investasi Pembangunan Industri Propelan	13 Oktober 2020	13 Oktober 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Update Proyek Mentarang Induk Hydroelectric Plant	21 Desember 2020	21 Desember 2020	Video Conference		
		Rapat Pengembangan Industri Farmasi Indonesia melalui peningkatan TKDN dalam Pengadaan Obat JKN	18 November 2020	18 November 2020	Video Conference		
		Pembahasan Rancangan PP 51 Tahun 2008 dan Revisi PMK 85 2012 dan PMK 37 2015	9 November 2020	31 Desember 2020	Video Conference		
		Rapat Update Progress Perubahan Regulasi WAPU BUMN Karya	30 November 2020	30 November 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi TL Penurunan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi dan WAPU BUMN Karya	4 Desember 2020	4 Desember 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Peningkatan Investasi dan Diversifikasi Perekonomian Bali	25 November 2020	27 November 2020	Hotel Fairfield by Marriot Legian, Bali		
5	Koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Kunjungan Kerja Mendampingi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan ke Depo LRT Bekasi Jawa Barat: kegiatan dilaksanakan untuk memantau proses pengerjaan LRT	28 Mei 2020	28 Mei 2020	Depo LRT, Bekasi	-	
		Site Visit di Stasiun LRT Harjamukti Jabodebek: kegiatan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan proyek LRT berlangsung	16 Juni 2020	16 Sept 2020	Stasiun LRT Harjamukti		
		Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penyelesaian Rencana Pelaksanaan KPBU Pembangunan TOD Poris Plawad Kota Tangerang: merupakan langkah untuk membahas permasalahan dan percepatan penyelesaian pembangunan TOD	7 Juli 2020	7 Juli 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Peninjauan Lapangan Depo LRT Jabodebek Jatimulya – Bekasi Timur	9 Juli 2020	9 Juli 2020	Depo LRT Jatimulya, Bekasi		
		Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rakor Menko tentang Realokasi Anggaran Pembangunan Jalan Tol di Mandarin Oriental	27 Agustus 2020	27 Agustus 2020	Mandarin Oriental Hotel, Jakarta		
		Konsultasi Publik Pembangunan Bandara Udara Kediri di Kediri Jawa di Jawa Timur	18 Agustus 2020	20 Agustus 2020	Bandara Kediri, Jawa Timur		
		<i>Focus Group Discussion (FGD) ke-2 (dua) Pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Desain Teknik Dasar (Basic Engineering Design) Moda Transportasi Kereta Perkotaan Bandara I Gusti Ngurah Rai - Sanur</i>	7 September 2020	9 September 2020	Quest San Hotel Denpasar, Bali		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Badan Pengatur Jalan Tol dan ATI di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur	9 September 2020	12 September 2020	Labuan Bajo, NTT		
		Peninjauan Lapangan Jalan Tol Jawa Timur di Gresik	13 September 2020	15 September 2020	Proyek Jalan Tol Trans Jawa		
		Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi Sismonev 2.0 Kemenko Marves Tahun 2020 di BSD City	24 September 2020	26 September 2020	Grand Zury Hotel, BSD		
		Rapat Koordinasi Teknis dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Peningkatan Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional di Aceh Timur	14 Juli 2020	16 Juli 2020	Pemkab Aceh Timur, Aceh		
		Pendampingan Kunjungan Lapangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bali	16 Agustus 2020	22 Agustus 2020	Denpasar, Bali		
		Rapat Koordinasi Badan Pengatur Jalan Tol dan ATI di Labuhan Bajo	9 September 2020	12 September 2020	Labuan Bajo, NTT		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Kunjungan Lapangan ke Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Pekan Baru, Dumai	13 September 2020	16 September 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		Peninjauan Lapangan Jalan Tol Cisumdawu di Sumedang dan Bandung	15 September 2020	17 September 2020	Proyek Tol Cisumdawu		
		Kunjungan Lapangan ke Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Medan, Sumatera Utara	22 September 2020	26 September 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		Kunjungan Lapangan ke Proyek Tol Cisumdawu di Bandung dan Sumedang	28 September 2020	30 September 2020	Proyek Jalan Tol Cisumdawu		
		Kunjungan Lapangan Banyuwangi-Bali, Pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Banyuwangi dan Bali	1 Oktober 2020	4 Oktober 2020	Banyuwangi dan Bali		
		Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Kemenko Marves di Bandung	16 Oktober 2020	18 Oktober 2020	Hotel Interkontinental Bandung Dago Pakar		
		Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Bersama KPBU	2 Oktober 2020	2 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Sengketa Lahan PT SMJ yang direncanakan untuk Pabrik Sepatu PT. Nike di Desa Cimohong, Kabupaten Brebes	8 November 2020	8 November 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Penanganan Jalan Jalur Horizontal-Tengah Selatan, Jawa Barat-Selatan	10 November 2020	10 November 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Pembebasan Lahan pada Ruas Jalan Tol Cimanggis-Cibitung	19 November 2020	19 November 2020	Video Conference		
		Kunjungan Kerja Pembahasan Jalan Tol, Kunjungan Tim Kerja	19 Oktober 2020	20 Oktober 2020	Medan, Sumatera Utara		
		Peninjauan Lapangan ke Pelabuhan Rembang. Provinsi Jawa Tengah	8 Oktober 2020	10 Oktober 2020	Rembang, Jawa Tengah		
		Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Rencana Kerja Kegiatan Tim Kerja Percepatan dan Pengawasan	1 Oktober 2020	1 Oktober 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Pembangunan Jalan Tol					
		Rapat Tim Kerja Percepatan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Tol	12 Oktober 2020	12 Oktober 2020	Video Conference		
		Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi dengan PIC Tol Semarang-Demak, Joglo-Kulon Progo, dan DIY-Bawen	12 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Jawa Tengah & DIY		
		Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Konsesi Pelabuhan Rembang di Kecamatan Sluke	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Ruas Jalan Tol Jawa Tengah-Jawa Timur	14 Oktober 2020	14 Oktober 2020	Video Conference		
		Menghadiri Undangan Pembahasan Penanganan Jalur Horizontal Tengah Selatan, Jawa Barat Selatan	16 Oktober 2020	18 Oktober 2020	Bappeda Provinsi Jawa Barat		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Peninjauan Lapangan (<i>Site Visit</i>) Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tol Semarang-Demak	21 Oktober 2020	22 Oktober 2020	BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah		
		Rapat Koordinasi Jalan Tol Jawa Tengah	8 Oktober 2020	8 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Ruas Jalan Tol Semarang-Demak	22 Oktober 2020	22 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Evaluasi Progres Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas DIY-Solo	15 Oktober 2020	16 Oktober 2020	Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah		
		Rapat Koordinasi Tim Kerja Percepatan dan Pengawasan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera	19 Oktober 2020	21 Oktober 2020	Bengkulu, Provinsi Bengkulu		
		Rapat Pembahasan Pendanaan Jalan Tol Trans Sumatera	27 November 2020	27 November 2020	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
6	Koordinasi Pertambangan	Rapat Koordinasi Klarifikasi Penerapan HPM oleh PT Virtue Dragon dan PT Obsidian Stainless Steel	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	Video Conference	-	-
		Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020	23 September 2020	23 September 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Sinkronisasi PMK No. 150/2018 Terhadap Klausul Kewajiban Kepatuhan Dalam Undang-Undang Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal	28 September 2020	28 September 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Klarifikasi Kapasitas Perusahaan Surveyor Untuk Mengakomodasi Kewajiban Verifikasi Perusahaan Tambang dan Perusahaan Smelter	28 September 2020	28 September 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Pengalihan Pelaksanaan Verifikasi Perusahaan Smelter Kepada Perusahaan Surveyor yang Terdaftar di Kementerian	30 September 2020	30 September 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		ESDM					
		Rapat Koordinasi Dukungan Insentif Fiskal dan Nonfiskal untuk Realisasi Proyek Coal to Methanol di Batuta Chemical Industrial Park	24 Juni 2020	24 Juni 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Penyiapan Revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 dan Transisi pengelolaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)	16 Juli 2020	17 Juli 2020	Aston Imperial Hotel, Bekasi		
		Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Ekstraksi Logam Tanah Jarang di Indonesia	6 Juli 2020	6 Juli 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi HPAL Tailing : PT Huayou dan QMB	23 September 2020	23 September 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Lanjutan HPM	19 Oktober 2020	19 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		
		Rapat Koordinasi Klasifikasi Penyesuaian Kontrak (HPM)	21 Oktober 2020	21 Oktober 2020	<i>Video Conference</i>		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Lanjutan HPM	30 November 2020	30 November 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Lanjutan HPM	9 Desember 2020	9 Desember 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Lanjutan HPM	21 Desember 2020	21 Desember 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Konsinyering Data Smelter dengan Kementerian ESDM	7 Oktober 2020	7 Oktober 2020	Video Conference		
		Rakor Permasalahan PETI di Kabupaten Pasuruan	17 Des 2020	18 Des 2020	Luminor Hotel, Jawa Timur		
		Peninjauan Lokasi Pertambangan Emas PETI di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	26 Oktober 2020	28 Oktober 2020	PT. Darmex Argo, Bengkayang, Kalimantan Barat		
		Rapat Koordinasi Permasalahan Tumpang Tindih Lahan PT.TBP	20 November 2020	20 November 2020	Video Conference		
		Rapat Koordinasi Dukungan Insentif Fiskal dan Nonfiskal untuk Realisasi Proyek Coal to Methanol di Batuta Chemical Industrial Park	24 Juni 2020	24 Juni 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		Rapat Koordinasi Penyiapan Revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 dan Transisi Pengelolaan EITI	16 Juli 2020	17 Juli 2020	Hotel Aston Bekasi, Jawa Barat		
		Pembahasan Rencana Proyek DME PT. Bukit Asam					

Sumber: Laporan Kegiatan di Aplikasi SIK-M, Bulan Januari s.d Desember 2020.